

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional pada dasarnya merupakan suatu proses perubahan struktural dalam bidang nasional dan ekonomi. Di mana dalam suatu proses perubahan tersebut haruslah menghasilkan perubahan yang dinamis dan menuju arah yang lebih baik lagi dari suatu tahap ke tahap berikutnya agar tercapai suatu masyarakat yang adil dan merata.

Kebijakan pembangunan nasional dengan berlandaskan Trilogi Pembangunan, harus memperhatikan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Proses pembangunan tidak saja mengejar pertumbuhan ekonomi tapi juga pengurangan ketidakadilan dan penghapusan masalah kemiskinan secara mutlak. Untuk mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di perlukan campur tangan dan penyertaan aktif pemerintah untuk membantu penduduk miskin keluar dari bawah garis kemiskinan. Tanpa bantuan pemerintah maka penduduk miskin akan semakin tidak mampu merebut bagian yang lebih layak dari pendapatan nasional dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Pembangunan dibidang ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat publik melalui upaya memperluas lapangan kerja dan meratakan tingkat pendapatan masyarakat. Melalui pembangunan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan menciptakan pergeseran sektor ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder menjadi sektor tersier. Dengan perkataan lain, arah pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan perkapita masyarakat naik secara bertahap dan akhirnya mantap dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah mempunyai hak dan kewajiban yang sekaligus merupakan pedoman yang harus dijalankan oleh setiap penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam menyelenggarakan otonomi, pemerintah daerah mempunyai hak seperti tercantum dalam Pasal 21 Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang hak dan kewenangan daerah. Diantara hak dan kewenangan daerah yaitu mengatur dan mengurus daerahnya, mengelola aparatur, mengelola kekayaan, memungut pajak dan retribusi, serta hak lain yang diatur didalam perundang-undangan.

Pemerintah daerah juga berkewajiban untuk mengimbangi hak dengan maksud untuk mengurangi eksese negatif yang mungkin timbul dalam pelaksanaan hak daerah otonom. Lebih lanjut kewajiban daerah diatur dalam Pasal 22 Undang- undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang kewajiban daerah, yang beberapa diantaranya adalah melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, dan menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan selalu dihadapkan pada tantangan yang semakin berat seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi dalam mempengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat terhadap tatanan kehidupan, baik ekonomi, sosial budaya, dan politik. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan pada pendekatan pembangunan yang selama ini ditempuh, yaitu ke arah pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di perlukan campur tangan dan penyertaan aktif pemerintah untuk membantu penduduk miskin keluar dari bawah garis kemiskinan.

Tanpa bantuan pemerintah maka penduduk miskin akan semakin tidak mampu merebut bagian yang lebih layak dari pendapatan nasional dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat di bagi menjadi empat macam kelompok peran (Dumairy 1997:158), yaitu:

1. Peran Alokatif, yaitu Peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi
2. Peran Distributif, yaitu peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan, dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar
3. Peran Stabilisatif, yaitu peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan *diseguilibrium*
4. Peran Dinamisatif, yaitu peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

Salah satu peran pemerintah adalah peran distribusi, yang mana dalam peran ini mengharuskan pemerintah untuk memperhatikan kelompok miskin dengan pemberian subsidi.

Menurut Suparmoko (2003:34) , subsidi (*transfer*) adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil apabila mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah. Subsidi dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu subsidi dalam bentuk uang (*cash transfer*) dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi innatura (*in kind subsidy*).

Strategi penanggulangan kemiskinan diarahkan dengan mendasarkan pada 2 (dua) pendekatan, pertama mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin khususnya yang

menyangkut kebutuhan dasar manusia dengan memberikan berbagai subsidi, kedua memperbesar kemampuan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan memperbesar akses berusaha khususnya kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Dalam hal ini pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yang kedua yaitu memperbesar kemampuan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan memperbesar akses berusaha khususnya kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Teori yang dipakai adalah fungsi atau peran pemerintah dalam hal distribusi. Peran distribusi merupakan peranan pemerintah dalam mendistribusikan Sumber Daya, kesempatan, dan hasil ekonomi secara adil dan wajar.

Berdasarkan data tahun 2008 dan tahun 2009 provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang cukup banyak penduduk miskin yang jumlahnya mencapai sebesar 15.883.000 dengan presentase sebesar 20,22% penduduk miskin bahkan jumlah tersebut adalah jumlah yang paling terbesar di pulau Sumatra di tahun 2009. Dengan jumlah penduduk miskin yang besar di Lampung, maka pemerintah dalam hal ini ingin menanggulangi kemiskinan diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung, khususnya di daerah Bandar Lampung melalui kebijakan program pembangunan sebagai “gerakan masyarakat”, yaitu suatu gerakan yang dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat Kota Bandar Lampung untuk berbuat kebaikan secara bersama dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat.

Program Gemma Tapis Berseri ini berlangsung saat dikeluarkannya Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Program Gerakan Masyarakat Membangun Tapis Berseri Kota Bandar Lampung. Kebijakan daerah ini keluar sebagai upaya dalam menerapkan kewenangan yang diberikan untuk daerah seperti tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Di

mana tujuan kegiatan Gemma Tapis Berseri adalah penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung. (petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis Gemma Tapis Berseri:2009)

Kebijakan Program Gemma Tapis Berseri ini dilakukan melalui program pemberian bantuan dana stimulan kepada masyarakat kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana lingkungan (infrastruktur) serta penyaluran di bidang non infrastruktur yaitu kredit ekonomi kerakyatan (EKOR) untuk mengembangkan perekonomian masyarakat golongan ekonomi lemah. Sebagai dana stimulan, masyarakat kelurahan diberikan kebebasan dalam menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan serta didorong untuk berpartisipasi aktif melalui penyiapan swadaya masyarakat.

Program kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR) didasari dengan Surat Perjanjian Nomor 581.971.36 .2007/581/3710/2 3/2007 tanggal 7 September 2007 antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Pasar, tentang pengelolaan dan penyaluran kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR) dengan Pola *Channeling* Program Gerakan Masyarakat Membangun Tapis Berseri Tahun Anggaran 2007. sebagai penyempurnaan atas Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PD. BPR Bank Pasar Nomor 581.398.A. 36.2006 / 02 .A.Tahun 2006 tanggal 9 Agustus 2006 tentang Pengelolaan dan Penyaluran Kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR) dengan Pola *Channeling*. Melalui program kredit EKOR ini pemerintah memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil/mikro perseorangan dengan tujuan untuk penggunaan untuk tambahan modal usaha.

Pemilihan jenis kegiatan usaha ekonomi produktif yang dibiayai oleh kredit EKOR dilakukan dengan pertimbangan pembiayaan terhadap kegiatan usaha termasuk dalam kelompok usaha

baru yang telah/ sedang menerima pembinaan dari dinas instansi teknis terkait, pembiayaan terhadap kegiatan usaha yang kurang produktif akibat kekurangan modal dan pembiayaan terhadap kegiatan usaha yang produktif yang memerlukan penambahan modal usaha. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor: 26 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Program Gerakan Masyarakat Membangun (Gemma) Tapis Berseri Kota Bandar Lampung 2009.

Kemudian dana bantuan dari Program Gemma Tapis Berseri ini dikelola oleh suatu Kelompok Masyarakat (Pokmas) masing-masing kelurahan yang ditunjuk melalui musyawarah kelurahan. Anggota Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang terpilih adalah masyarakat yang tidak mempunyai kriteria antara lain bukanlah aparat kelurahan setempat, TPPK, TKPK, LPM dan PNS (Pegawai Negeri Sipil). (Petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis gemma tapis berseri:2009). Atas dasar pengajuan tersebut, PD BPR Bank Pasar melakukan survey atas kelayakan nasabah untuk memberikan persetujuan. Setelah ada persetujuan, PD BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung selaku pelaksana program Gemma Tapis Berseri Bidang Ekonomi Kerakyatan menyampaikan rekapitulasi pencairan kredit EKOR setiap bulannya kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Berikut merupakan tabel jumlah besarnya dana yang di berikan pemerintah Kota Bandar Lampung melalui program Gemma Tapis Berseri baik di bidang infrastruktur maupun bidang ekonomi kerakyatan tahun 2006 sampai 2009.

Tabel 1. Jumlah dana yang diberikan pada program Gemma Tapis Berseri tahun 2006-2009.

Tahun	Bidang Infrastruktur	Bidang Ekonomi Kerakyatan	Plafond
2006	Rp. 1.500.000.000	Rp. 2.500.000.000	Rp. 4.000.000.000

2007	Rp. 2.500.000.000	Rp. 4.000.000.000	Rp. 6.500.000.000
2008	Rp. 2.500.000.000	Rp. 4.000.000.000	Rp. 6.500.000.000
2009	Rp. 2.500.000.000	Rp. 6.500.000.000	Rp. 9.000.000.000

Sumber: PD BPR Bank Pasar

Berdasarkan tabel diatas di ketahui bahwa pembagian dana program Gemma Tapis Berseri pada tahun 2006 sebesar Rp. 1,5 milyar di bidang infrastruktur dan Rp. 2,5 milyar untuk bidang Kredit EKOR sehingga jumlah keseluruhan bantuan sebesar Rp 4 milyar. Kemudian pada tahun 2007 dan 2008 terjadi peningkatan jumlah dana yaitu untuk bidang infrastruktur sebesar Rp. 2,5 milyar dan Rp. 4 milyar untuk bidang kredit EKOR sehingga total keseluruhan sebesar Rp 6,5 milyar. Kemudian pada tahun 2009 terjadi peningkatan yang lebih besar lagi yaitu sebesar Rp 9 milyar, akan tetapi peningkatan yang lebih besar di berikan pemerintah dalam bentuk program EKOR, hal ini bertujuan agar pemerintah lebih bisa lagi mempercepat pembangunan ekonomi daerah sekitar serta memberikan peluang yang lebih besar untuk membantu perkembangan usaha mikro atau kecil khususnya masyarakat yang memiliki usaha perorangan akan tetapi memiliki kendala keterbatasan modal untuk mengembangkan usahanya.

Khusus untuk kredit Program Gerakan Masyarakat Membangun (Gemma) Tapis Berseri Bidang Ekonomi Kerakyatan, pencairan dilakukan setelah usulan kredit diverifikasi oleh Bank Pasar. Kegiatan dilakukan dalam waktu panjang dan dilakukan secara bergulir. Kredit EKOR ini diberikan kepada usaha ekonomi produktif perorangan.

Dalam kredit EKOR besarnya bantuan yang diberikan kepada peminjam usaha ekonomi produktif perorangan maksimal sebesar Rp. 1.000.000 per orang untuk debitur baru dan minimal Rp. 500.000 per orang untuk debitur baru. Sedangkan untuk debitur atau peminjam lama di berikan bantuan sebesar Rp. 2.000.000 per orang. Dan apabila kelurahan yang diberikan bantuan kredit ekor dapat terus berkembang dan lancar dalam arti kelurahan yang

jumlah tunggakannya tidak melebihi dari Rp. 5.000.000 dan atau prosentase tunggakan di bawah 10 % maka kelurahan tersebut akan diberikan tambahan kredit.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 12 tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Program Gerakan Masyarakat Membangun (Gemma) Tapis Berseri Kota Bandar Lampung, program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2006 hingga sekarang yang disebar pada 13 kecamatan dan 98 kelurahan di Bandar Lampung.

Dasar yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian di kota Bandar Lampung adalah karena Program Gemma Tapis Berseri merupakan program kebijakan yang hanya dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung yang khusus di peruntukkan di wilayah Bandar Lampung. Kemudian penelitian di lakukan di Kecamatan Kemiling adalah karena dari keseluruhan 13 kecamatan di Bandar Lampung yang menerima bantuan program kredit ekonomi kerakyatan (EKOR) hanya Kecamatan Kemiling yang kelurahannya memiliki tingkat pengembalian pinjaman sebesar 0% atau tidak pernah mengalami tunggakan yaitu Kelurahan Pinang Jaya.

Berdasarkan laporan dari PD BPR Bank Pasar selama tahun 2009/2010 kelurahan Pinang Jaya merupakan kelurahan yang paling terbaik dan berkembang bantuan dana pinjaman bergulir atau kredit ekor. Dimana kelurahan Pinang Jaya selalu tepat waktu dalam hal pengembalian pinjaman, bahkan Pinang Jaya tidak pernah mengalami penunggakan dalam hal pengembalian kredit.

Selain itu alasan yang kedua dipilihnya kelurahan Pinang Jaya karena berdasarkan data yang diperoleh kelurahan Pinang Jaya memiliki jumlah penduduk yang padat dan memiliki banyak usaha-usaha mikro akan tetapi mengalami banyak kendala dalam hal permodalan untuk mengembangkan usaha-usaha mikro tersebut.

Sasaran pemberian bantuan dana pinjaman bergulir (kredit EKOR) adalah masyarakat yang menjalankan kegiatan ekonomi produktif (bukan konsumtif) sebagai usaha untuk menunjang pengembangan ekonomi kerakyatan golongan ekonomi lemah di Kelurahan Pinang Jaya dalam meningkatkan pendapatan.

Program Gemma Tapis Berseri bidang ekonomi kerakyatan (kredit EKOR) merupakan bentuk pengeluaran pemerintah yaitu bentuk pemberian subsidi yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Subsidi yang diberikan berupa Bantuan Langsung Masyarakat (dana pinjaman bergulir) ini bisa dikatakan berhasil apabila masyarakat yang menerima manfaat dari subsidi tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin yang memiliki usaha kecil dan menengah yaitu peningkatan pendapatan usaha masyarakat. Selain itu, dengan adanya program Gemma Tapis Berseri ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi di sektor masyarakat miskin sampai menengah bawah. Hal ini untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi yang dialokasikan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan modal untuk menjalankan wirausahanya.

Berdasarkan pernyataan yang di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Analisis Dampak Bantuan Dana Pinjaman Bergulir (kredit EKOR) Program Gemma Tapis Berseri Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro di Kelurahan Pinang Jaya Kecamatan Kemiling Bandar Lampung.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

“Bagaimana Dampak Bantuan Pinjaman Bergulir (Kredit EKOR) Program Gemma Tapis Berseri terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro di Kelurahan Pinang Jaya Kecamatan Kemiling Bandar Lampung”

C. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Dampak Bantuan Dana Pinjaman Bergulir (kredit EKOR) Program Gemma Tapis Berseri terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro di Kelurahan Pinang Jaya Kecamatan Kemiling Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui manfaat bantuan dana pinjaman bergulir (kredit EKOR) Program Gemma Tapis Berseri terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro di Kelurahan Pinang Jaya Kecamatan Kemiling Bandar Lampung.

D. Kerangka Pemikiran

Pembangunan merupakan kegiatan yang terus menerus dilaksanakan oleh setiap negara, baik negara yang tergolong maju maupun negara-negara yang sedang berkembang. Tujuan

pembangunan ekonomi pada umumnya adalah peningkatan pendapatan riil per kapital serta adanya unsur keadilan atau pemerataan dalam penghasilan dan peningkatan usaha (Irawan dan Suparmoko, 1990:19).

Salah satu langkah agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai, maka pembangunan dimulai dari daerah-daerah yang pusat pemerintahannya terkecil yaitu desa atau kelurahan. Hal ini agar gerak dan langkah atau arah pembangunan senantiasa tetap tertuju kepada kepentingan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil serta dapat diperhatikan dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan.

Untuk tercapainya daya guna dan hasil guna pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan berbagai kegiatan, partisipasi masyarakat perlu digalakkan dalam penyelenggaraan pembangunan, terutama pembangunan desa. Tentunya pembangunan dengan metode perencanaan dari bawah (*bottom up planing*). Selama ini pembangunan yang dilaksanakan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat banyak yang bersifat *top down planning*, tanpa melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaannya maupun pelaksanaannya, sehingga pembangunan yang ada tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat kecil pada khususnya.

Dalam proses pembangunan disebutkan bahwa salah satu peran pemerintah yang sangat penting adalah peran distribusi. Peran distribusi merupakan peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar.

Dalam hal ini, peran distribusi terwujud melalui peran pemerintah dalam pemberian bantuan langsung masyarakat berupa dana pinjaman bergulir terhadap masyarakat miskin.

Pengeluaran negara dalam bentuk upaya pemindahan kekayaan kepada individu untuk kesejahteraan disebut transfer pemerintah (*goverment transfer payment*).

Subsidi masuk dalam kategori pengeluaran rutin pemerintah, menurut Suparmoko subsidi merupakan salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil apabila mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari upaya pembangunan secara nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera. Pembangunan daerah tersebut diselenggarakan dengan upaya terpadu yang menggabungkan berbagai dimensi kebijakan, meliputi : pengembangan masyarakat, perwujudan pemerintahan yang baik, integrasi ekonomi antar wilayah dan keterkaitan ekonomi global, pelayanan regional dan lokal, serta pengelolaan pertanahan dan tata ruang (termasuk pemanfaatan sumber daya alam).

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah agar dapat memberikan sumbangan yang maksimal dalam keseluruhan usaha pembangunan nasional harus dilakukan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk menjamin koordinasi yang baik maka harus adanya landasan program pembangunan pusat dan daerah, maka perlu adanya sikap proaktif dari pemerintah daerah dalam mengadakan perencanaan atau program pembangunan daerahnya.

Pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di daerahnya dapat melakukan berbagai kebijakan, seperti program-program pemberdayaan masyarakat miskin. Selain program tersebut memberikan manfaat yang sangat berarti terhadap masyarakat miskin berbagai program yang dilakukan pemerintah juga dapat memberikan dampak atau pengaruh terhadap masyarakat, baik dampak positif maupun negatif. Suatu program dapat dikatakan berhasil bila dapat memberikan dampak yang positif atau pengaruh yang baik terhadap

masyarakat misalnya kesejahteraan masyarakat meningkat melalui peningkatan pendapatan masyarakat serta mengurangi jumlah KK miskin dan sebaliknya.

Seperti yang terjadi di kelurahan Pinang Jaya sebelum diadakannya bantuan pinjaman bergulir di kelurahan Pinang Jaya masyarakat di kelurahan khususnya yang memiliki usaha perseorangan mengalami kesulitan untuk mengembangkan usahanya dalam hal permodalan, akan tetapi kemudian pemerintah kota Bandar Lampung melakukan kebijakan yaitu melalui Program Gemma Tapis Berseri. yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung (petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis Gemma Tapis Berseri:2009).

Kebijakan Gemma Tapis Berseri ini dilakukan melalui program pemberian bantuan dana stimulan kepada masyarakat kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana lingkungan serta penyaluran kredit ekonomi kerakyatan (EKOR) untuk mengembangkan perekonomian masyarakat golongan ekonomi lemah. Dimana pemerintah memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil/mikro, akan tetapi mengalami kesulitan atau kekurangan di dalam hal permodalan usaha atau pengembangan usaha.

Sasaran Kredit EKOR adalah masyarakat yang menjalankan usaha produktif sebagai usaha untuk menunjang pengembangan ekonomi kerakyatan golongan ekonomi lemah di kota bandar lampung untuk kewirausahaan pada bidang perindustrian, perdagangan , pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, dan peningkatan pendapatan petani, nelayan kecil serta bidang usaha jasa lainnya.

Program ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap masyarakat, karena masyarakat yang memiliki usaha tidak lagi mengalami kesulitan karena dapat mengembangkan usahanya melalui pinjaman dana bantuan bergulir atau yang disebut dengan kredit EKOR. Dampak

langsung dari program ini adalah terdapat penambahan modal usaha kepada masyarakat yang memiliki usaha ekonomi perorangan. Sehingga secara tidak langsung akibat dari penambahan modal usaha tersebut akan mengembangkan usaha sehingga pendapatan akan meningkat kemudian semua kebutuhan hidup masyarakat akan terpenuhi seperti pendidikan, kesehatan dll.

Dengan begitu salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program adalah melalui tingkat pendapatan yang pada umumnya digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam melakukan suatu kegiatan. Dengan demikian tingkat pendapatan merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk melihat keberhasilan atau tidaknya tujuan atau program yang ditentukan.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab, meliputi:

- I. Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

- II. Tinjauan Pustaka yang berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan penulisan ini.
- III. Metode penelitian meliputi alat analisis dan gambaran umum Kelurahan Pinang Jaya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.
- IV. Hasil perhitungan dan pembahasan.
- V. Simpulan dan Saran

Daftar Pustaka

Lampiran